

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan penyempurnaan pendidikan di Indonesia terus diupayakan. Pendidikan pada umumnya merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan. Diharapkan pendidikan dapat membawa perubahan baik oleh peserta didik maupun masyarakat untuk maju dan berkembang. Pendidikan juga mengalami beberapa perubahan yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah dan undang-undang. Diantaranya perubahan pada sistem sentralistik menjadi desentralistik, hal itu memberikan kebebasan kepada pemimpin pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pelaksanaan pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan di sekolah mutlak diserahkan kepada kepala sekolah dan dewan guru. Segala pengambilan keputusan dan kebijaksanaan sekolah disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Hal ini merupakan pelaksanaan manajemen sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Otonomi sekolah yang dipercayakan kepada sekolah melalui MBS diharapkan mampu berinovasi dan berkreasi untuk berlomba – lomba memajukan sekolah.

Sejalan dengan pandangan Barlian (2013: 2) bahwa “ MBS merupakan suatu bentuk manajemen/pengelolaan sekolah yang sepenuhnya diserahkan

kepada pihak sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sesuai dengan aturan perundang-undangan pendidikan yang berlaku. Dalam bidang pendidikan, otonomi ini berupa kewenangan yang diberikan kepada sekolah". Tujuan utama implementasi MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Selain itu MBS juga bertujuan untuk mendirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah.

Kebijakan sekolah dalam implementasi MBS agar dapat mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah diperoleh melalui partisipasi orangtua, pengelolaan sekolah dan peningkatan profesionalisme pendidik. MBS memberdayakan semua sumberdaya manusia dan mengoptimalkan penggunaan semua fasilitas yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan sekolah. Sumberdaya manusia merupakan unsur pokok sekolah yang salahsatu diantaranya adalah komite sekolah.

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah (Kepmendiknas, Nomor 044/U/2002).

Salah satu tujuan dibentuknya komite sekolah adalah untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam kebijakan operasional. Komite sekolah harus bisa menjembatani atau sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Orangtua siswa merupakan salah satu konsumen yang harus dilayani dengan baik demi kemajuan sekolah. Olehkarena itu komite sekolah diharapkan mampu berperan aktif dalam menyalurkan aspirasi siswa, orangtua dan masyarakat.

Komite sekolah dibentuk sebagai organisasi pendukung dalam pelaksanaan MBS. Pembentukan komite sekolah melibatkan pihak sekolah, orangtua siswa, tokoh masyarakat. Dalam melaksanakan MBS berarti sekolah memakai sitem pengelolaan yang baru. Ini berarti sekolah akan menjalani proses pembaharuan padahal sesuatu yang baru itu belum tentu akan langsung berhasil. Olehkarena itu sekolah melalui komite sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengadakan pembaharuan. Dukungan kepada sekolah akan lebih besar lagi apabila sekolah dengan melaksanakan MBS dapat menunjukkan adanya nilai tambah bagi masyarakat.

Tetapi kenyataan yang ada saat ini adalah kebanyakan komite sekolah kurang memaksimalkan kinerjanya, sekolah dalam pelaksanaan tugas-tugas komite hanya sebagai simbolis belaka. Ada beberapa sekolah yang keberadaan komite sekolahnya hanya tertera nama dan anggotanya sedangkan kinerjanya tidak berfungsi. Kurangnya pemberdayaan komite sekolah dalam peran penting sebagai pemberi pertimbangan, sebagai

pendukung dan sebagai pengontrol akan mempengaruhi terhadap peningkatan mutu disekolah.

Komite Sekolah di SD Negeri Bulukantil Jebres Surakarta sebagai perwujudan dan penerapan MBS belum menunjukkan perannya dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan pendidikan. Peran komite sangat diharapkan untuk dapat memberi pertimbangan semua kebijakan sekolah. Komite Sekolah kurang mampu memberikan masukan, usul, saran dan himbauan yang diharapkan. Komite Sekolah juga belum berperan sebagai pendukung terhadap semua program sekolah serta pengawasan dalam semua kegiatan sekolah juga masih sangat terbatas.

Perencanaan program komite sekolah di SDN Bulukantil diantaranya pelaksanaan rapat-rapat dalam pengambilan kebijakan sekolah. Rapat pengambilan kebijakan sekolah dilakukan diawal tahun pelajaran dan waktu-waktu tertentu jika dibutuhkan. Kordinasi antara Sekolah yaitu kepala sekolah dan guru, tokoh masyarakat serta komite sekolah.

Harapan SD Negeri Bulukantil untuk dapat memberdayakan Komite Sekolah yang seharusnya ikut menentukan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Bisa memberikan saran atau pertimbangan dalam perencanaan program. Mampu memberikan dukungan baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam pelaksanaan program. Dapat melakukan pengontrolan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pelaksanaan program kebijakan.

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada kabupaten/kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah.

Konsep partisipasi sekolah (*school-based management*), yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi telah dilaksanakan di Indonesia. Dalam penyelenggaraan pendidikan banyak yang harus bertanggung jawab terhadap pencapaian keberhasilan pendidikan. Tanggungjawab tersebut bukan hanya pemerintah pusat melainkan juga pemerintah provinsi, kabupaten, pihak sekolah, orang tua dan masyarakat.

Dalam pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada Dewan pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah yang memiliki tiga peran.

- “1. Masyarakat berperan dalam peningkatan perannya yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.
2. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
3. Komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan,

arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.”

Komite Sekolah dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Pembentukan Komite Sekolah harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan Komite Sekolah adalah sebagai pemberi pertimbangan, sebagai pendukung, sebagai pengawas dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Sedangkan yang terakhir adalah sebagai mediator antara Orangtua dengan pihak Sekolah.

Komite sekolah berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 044/U/2002, bertujuan untuk (1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan. (2) Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. (3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan perlu adanya pemberdayaan masyarakat sebagai mitra pendidikan. Segala bentuk kerjasama dan kebersamaan sangat diperlukan demi terlaksananya semua program sekolah yang sudah direncanakan. Dengan demikian semua potensi yang ada bisa dikembangkan secara maksimal sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Pemanfaatan potensi yang ada serta kerjasama sudah merupakan modal yang cukup untuk mewujudkan mutu pendidikan .

Komite sekolah yang merupakan syarat diterapkannya MBS masih belum berperan secara optimal, pengambilan keputusan lebih banyak diambil oleh pihak sekolah. Komite sekolah juga kurang mampu melaksanakan empat peran penting sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti secara ilmiah tentang: "Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SD Negeri Bulukantil Jebres Surakarta"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada dua permasalahan yang perlu dibahas yang menjadi fokus penelitian .

1. Bagaimanakah implementasi MBS di SD Negeri Bulukantil Jebres Surakarta ?.
2. Bagaimanakah pemberdayaan peran Komite Sekolah dalam penerapan MBS di SD Negeri Bulukantil Jebres Surakarta ?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mendeskripsikan pemberdayaan Komite Sekolah dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SD Negeri Bulukantil Jebres Surakarta.

Tujuan yang lebih khusus dari penelitian ini ada dua

1. Untuk mendeskripsikan implementasi MBS di SD Negeri Bulukantil Jebres Surakarta.
2. Untuk mendeskripsikan Pemberdayaan peran komite Sekolah dalam penerapan MBS di SD Negeri Bulukantil Jebres Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak peneliti maupun bagi ilmu dan pengetahuan secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan komite sekolah dalam implmenetasi MBS.
 - b. Menjadikan bahan masukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan acuan penelitian lebih lanjut terhadap aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini.
2. Manfaat praktis
 - A. Komite Sekolah, agar lebih memahami peran dan fungsinya dalam mendukung sekolah serta mampu memberikan kontribusi sebagai mitra sekolah.
 - B. Guru dan kepala sekolah agar bekerja sama dengan komite sekolah untuk mengelola sekolah dengan baik